



Optimalisasi Beban Administratif: Pendekatan Komprehensif Prosedur dan Perampingan Strategi Pengelolaan Badan Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Ruth Elita Gultom¹, Tahta Perjalanan²

^{1,2} Universitas Negeri Semarang

Abstrak

Received: 08 Juni 2024

Revised: 15 Juni 2024

Accepted: 22 Juni 2024

This research aims to investigate and analyze in depth administrative burden procedures in the context of agency management. The main focus of this research is optimizing efficiency through a comprehensive understanding of administrative procedures and implementing streamlining strategies. Through an analytical approach, we evaluate various administrative procedures that contribute to workload. This analysis includes identification of obstacles and deviations that may occur in the implementation of these procedures. Next, we examine downsizing strategies that can be implemented to increase the efficiency of managing administrative burden. Therefore, this research makes a significant contribution to our understanding of how service agencies can optimize their administrative burden through comprehensive procedural analysis and implementation of appropriate streamlining strategies.

Keywords: *administration, burden, workload*

(*) Corresponding Author: rutheliitaaa@students.unnes.ac.id

How to Cite: Gultom, R. E., & Perjalanan, T. (2024). Optimalisasi Beban Administratif: Pendekatan Komprehensif Prosedur dan Perampingan Strategi Pengelolaan Badan Dinas Perindustrian dan Perdagangan. <https://doi.org/10.5281/zenodo.12587914>

PENDAHULUAN

Dalam era globalisasi dan kemajuan teknologi, sektor industri dan perdagangan menduduki posisi sentral dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, baik bagi Indonesia maupun negara-negara lainnya. Dalam konteks ini, Dinas Perindustrian dan Perdagangan memainkan peran yang sangat strategis. Tugas dan tanggung jawab dinas ini tidak hanya melibatkan pengaturan dan pengawasan, tetapi juga mendorong perkembangan dinamis sektor industri dan perdagangan¹.

Dengan cepatnya perubahan dalam lingkungan bisnis global, Dinas Perindustrian dan Perdagangan dihadapkan pada tantangan untuk mengoptimalkan beban administratifnya. Semakin kompleksnya tugas-tugas administratif mengharuskan dinas ini untuk terus beradaptasi dengan perkembangan teknologi dan menggali inovasi untuk meningkatkan efisiensi operasional².

Pentingnya mengoptimalkan beban administratif tidak hanya terletak pada peningkatan produktivitas internal dinas, tetapi juga dalam memberikan dukungan yang lebih baik kepada pelaku industri dan perdagangan. Dengan mengurangi

¹ Sulistyastuti, D. R. (2004). Dinamika usaha kecil dan menengah (ukm) analisis konsentrasi regional ukm di Indonesia 1999–2001. *Economic Journal of Emerging Markets*, 9(2).

² Kismono, G. (1999). Perubahan Lingkungan, Transformasi Organisasional dan Reposisi Peran Fungsi Sumberdaya Manusia. *Journal of Indonesian Economy and Business (JIEB)*, 14(2).



hambatan administratif, Dinas Perindustrian dan Perdagangan dapat memberikan lingkungan yang lebih kondusif bagi pertumbuhan usaha, investasi, dan inovasi di sektor-sektor terkait. Penerapan teknologi informasi, otomatisasi proses administratif, dan perbaikan terus-menerus pada kebijakan dan prosedur internal dapat menjadi solusi untuk mengatasi beban administratif yang semakin kompleks³. Pembaruan sistem informasi dan pemanfaatan alat teknologi terkini dapat memberikan dinas ini kemampuan untuk mengelola data dengan lebih efektif, mempercepat proses perizinan, dan memberikan pelayanan yang lebih responsif kepada pemangku kepentingan⁴.

Selain itu, peningkatan keterampilan pegawai melalui pelatihan dan pengembangan juga menjadi kunci dalam menghadapi tantangan ini. Dengan memastikan bahwa staf dinas memiliki pemahaman yang mendalam tentang perubahan teknologi dan tata kelola administratif yang efisien, Dinas Perindustrian dan Perdagangan dapat lebih proaktif dalam merespons dinamika sektor industri dan perdagangan.

Pada akhirnya, mengoptimalkan beban administratif dalam Dinas Perindustrian dan Perdagangan bukan hanya tentang efisiensi internal, tetapi juga tentang menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan dan daya saing sektor industri dan perdagangan di tengah-tengah tantangan global. Dengan strategi yang tepat, dinas ini dapat memainkan peran yang lebih efektif dalam mewujudkan visi pertumbuhan ekonomi berkelanjutan bagi Indonesia. Indonesia sebagai negara berkembang dengan potensi ekonomi yang besar, dihadapkan pada dinamika industri dan perdagangan yang cepat. Proses administratif yang kompleks dan kurangnya strategi pengelolaan badan yang efektif dapat menjadi hambatan bagi efisiensi dan responsivitas dinas dalam menjawab kebutuhan pemangku kepentingan. Oleh karena itu, pemahaman mendalam terkait analisis komprehensif prosedur administratif dan strategi perampingan pengelolaan badan di Dinas Perindustrian dan Perdagangan menjadi kunci untuk mencapai efisiensi.

Selain itu, perkembangan literatur mengenai optimalisasi beban administratif dalam konteks pelayanan publik di Indonesia masih terbatas. Penelitian ini menjadi relevan karena dapat memberikan wawasan baru dan kontribusi pada literatur terkait praktik administratif di dinas sejenis di Indonesia. Dengan demikian, penelitian ini akan menjadi langkah signifikan dalam meningkatkan pemahaman dan memberikan solusi konkret terhadap permasalahan kompleks dalam pengelolaan administratif di Dinas Perindustrian dan Perdagangan, dengan dampak positif pada perkembangan sektor industri dan perdagangan di Indonesia secara keseluruhan.

Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi positif yang signifikan pada berbagai aspek dalam konteks Dinas Perindustrian dan Perdagangan serta sektor industri dan perdagangan di Indonesia secara keseluruhan. Beberapa manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini antara lain:

³ Zebua, R. S. Y., Hendriyani, C., Sukmadewi, R., Thaha, A. R., Tahir, R., Purbasari, R., ... & Subagja, A. D. (2023). *BISNIS DIGITAL: Strategi Administrasi Bisnis Digital Untuk Menghadapi Masa Depan*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.

⁴ Rusman, A. D. P., & Suwardoyo, U. (2022). *Penerapan Sistem Informasi Berbasis IT Pengolahan Data Rekam Medis untuk Peningkatan Pelayanan di Rumah Sakit*. Penerbit NEM.

Pertama, penelitian ini diharapkan mampu meningkatkan efisiensi operasional Dinas Perindustrian dan Perdagangan dengan memberikan pemahaman yang lebih mendalam terhadap prosedur administratif yang ada. Dengan melakukan analisis komprehensif, penelitian ini dapat mengidentifikasi potensi perbaikan, menghilangkan redundansi, dan mempercepat proses-proses yang ada, sehingga memberikan kontribusi langsung pada peningkatan efisiensi internal dinas.

Kedua, hasil penelitian ini diharapkan mampu meningkatkan kualitas layanan yang diberikan kepada pelaku industri dan perdagangan. Dengan mengoptimalkan beban administratif, Dinas Perindustrian dan Perdagangan dapat memberikan pelayanan yang lebih cepat, akurat, dan responsif terhadap kebutuhan pemangku kepentingan, seperti pengusaha, produsen, dan konsumen. Hal ini dapat menciptakan lingkungan bisnis yang kondusif dan mendukung pertumbuhan sektor industri dan perdagangan di Indonesia.

Ketiga, penelitian ini diharapkan dapat memberikan dukungan pada pertumbuhan ekonomi lokal. Dengan meningkatkan efisiensi operasional dan kualitas layanan di Dinas Perindustrian dan Perdagangan, hasil penelitian ini dapat berkontribusi pada daya saing sektor industri dan perdagangan di tingkat lokal maupun nasional. Peningkatan daya saing ini dapat mendorong investasi, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan kontribusi sektor industri dan perdagangan terhadap perekonomian Indonesia secara keseluruhan.

Keempat, temuan dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan panduan dan referensi bagi instansi pemerintahan lainnya dalam upaya optimalisasi beban administratif. Dengan membagikan best practices dan strategi yang berhasil diterapkan, penelitian ini dapat menjadi landasan untuk perbaikan administratif di berbagai sektor pemerintahan. Secara keseluruhan, manfaat dari penelitian ini akan melampaui batas-batas Dinas Perindustrian dan Perdagangan, membawa dampak positif pada efisiensi, pelayanan, pertumbuhan ekonomi, dan praktek administratif di tingkat nasional

METODE

Penelitian ini berjenis penelitian kualitatif secara yuridis normatif, pendekatan hukum yang penulis gunakan adalah, Pendekatan undang-undang dan pendekatan komparatif. Adapun Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah data sekunder melalui bahan-bahan pustaka dan wawancara terhadap instansi. Sumber data yang digunakan yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang selanjutnya dianalisis secara yuridis normatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Badan Dinas Perindustrian dan Perdagangan memiliki peran krusial dalam mendorong pembangunan ekonomi daerah⁵. Untuk memastikan efisiensi operasional yang optimal, analisis mendalam mengenai beban administratif, prosedur, dan strategi perampingan menjadi langkah penting. Pembahasan ini mencerminkan hasil penelitian

⁵ Djadjuli, D. (2018). Peran pemerintah dalam pembangunan ekonomi daerah. *Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara*, 5(2), 8-21.

yang dilakukan untuk meningkatkan kinerja Badan Dinas dan mendukung pertumbuhan sektor industri dan perdagangan.

Analisis beban administratif menjadi titik awal yang esensial. Menilai sejauh mana tugas-tugas administratif memengaruhi efisiensi operasional memberikan pemahaman mendalam tentang area-area yang memerlukan perhatian khusus. Beban administratif yang berlebihan dapat menghambat kinerja dan inovasi. Oleh karena itu, strategi perampingan yang efektif harus dimulai dengan pemahaman yang komprehensif terkait beban administratif tersebut. Prosedur operasional juga menjadi fokus utama dalam upaya meningkatkan efisiensi. Identifikasi proses-proses yang lambat atau tidak efisien dapat membuka peluang untuk perbaikan yang signifikan. Pengembangan prosedur operasional yang lebih efektif dapat mempercepat pelaksanaan tugas-tugas, mengurangi birokrasi, dan meningkatkan respon terhadap kebutuhan industri dan perdagangan.

Strategi perampingan harus diterapkan secara holistik dan terkoordinasi. Salah satu langkah konkret yang dapat diambil adalah pembaruan sistem informasi. Namun, pembaruan ini bukan hanya masalah mengganti perangkat lunak, melainkan juga mencakup investasi dalam pelatihan intensif bagi personel yang akan menggunakan sistem tersebut.

Pelatihan intensif menjadi kunci dalam memastikan bahwa personel memiliki pemahaman yang mendalam tentang sistem informasi yang baru. Dengan meningkatkan keterampilan dan pengetahuan mereka, personel dapat mengadopsi teknologi baru dengan efektif, meminimalkan potensi hambatan dalam proses transisi, dan memastikan bahwa investasi dalam sistem informasi memberikan hasil yang diharapkan. Implementasi strategi perampingan, termasuk pembaruan sistem informasi, harus dilakukan dengan hati-hati. Proses ini memerlukan perencanaan yang matang, termasuk penjadwalan yang tepat agar tidak mengganggu operasional sehari-hari. Komunikasi yang efektif kepada seluruh personel juga penting untuk menghindari resistensi terhadap perubahan dan memastikan dukungan penuh dari tim.

Pemantauan berkelanjutan terhadap implementasi strategi perampingan menjadi langkah selanjutnya yang sangat penting. Evaluasi yang berkesinambungan diperlukan untuk menilai efektivitas langkah-langkah yang diambil dan mengidentifikasi area yang memerlukan penyesuaian lebih lanjut. Pemantauan ini dapat melibatkan umpan balik dari pengguna sistem baru, pemantauan kinerja operasional, dan pengukuran indikator kunci lainnya.

Dengan implementasi strategi perampingan yang cermat dan berkelanjutan, Badan Dinas Perindustrian dan Perdagangan dapat membangun fondasi yang kuat untuk merespons dinamika ekonomi dan industri secara efektif. Dengan fokus pada pembaruan sistem informasi, perbaikan prosedur operasional, dan pengembangan keterampilan personel, Badan Dinas dapat tidak hanya meningkatkan efisiensi operasionalnya tetapi juga memberikan dukungan yang lebih baik kepada pertumbuhan sektor industri dan perdagangan di wilayahnya. Inisiatif ini tidak hanya mendukung pembangunan ekonomi daerah, tetapi juga memberikan manfaat maksimal kepada masyarakat. Beban administratif merupakan faktor kunci yang mempengaruhi efisiensi dan kinerja suatu badan dinas. Analisis beban administratif menjadi langkah penting dalam upaya mendukung efisiensi operasional dan penyediaan layanan yang lebih baik kepada masyarakat. Artikel ini akan membahas pentingnya analisis beban administratif dalam konteks badan dinas dan bagaimana hal ini dapat menjadi landasan untuk perbaikan dan peningkatan kinerja.

Beban administratif mencakup berbagai kegiatan administratif, mulai dari pengelolaan dokumen, pelaporan, hingga kegiatan rutin administratif lainnya. Analisis beban administratif bertujuan untuk mengidentifikasi sejauh mana beban tersebut mempengaruhi efisiensi operasional dan apakah ada potensi perbaikan yang dapat dilakukan.

Dalam badan dinas, analisis beban administratif dapat membongkar struktur birokrasi yang mungkin telah menjadi tidak efisien. Identifikasi proses yang memerlukan banyak waktu atau sumber daya dapat membantu badan dinas mengidentifikasi area-area yang memerlukan perubahan atau penyederhanaan. Sebagai contoh, penggunaan teknologi informasi dapat mengurangi beban administratif dalam pengelolaan dokumen dan pelaporan. Selain itu, analisis beban administratif memberikan wawasan terhadap sumber daya yang diperlukan untuk menjalankan operasional sehari-hari. Dengan pemahaman yang lebih baik tentang beban administratif, badan dinas dapat mengalokasikan sumber daya secara lebih efisien, termasuk anggaran, personel, dan waktu. Hal ini memungkinkan fokus yang lebih besar pada kegiatan inti yang mendukung tujuan strategis badan dinas.

Implementasi hasil analisis beban administratif juga dapat meningkatkan kepuasan pegawai. Dengan memperhatikan efisiensi dan menyederhanakan proses kerja, pegawai dapat merasa lebih produktif dan memiliki motivasi yang lebih tinggi. Hal ini menciptakan lingkungan kerja yang lebih baik dan mendukung peningkatan kinerja secara keseluruhan.

I. Analisis Beban Administratif

Analisis beban administrasi merupakan suatu proses evaluasi terhadap berbagai tugas administratif yang harus diemban oleh suatu organisasi atau perusahaan. Beban administrasi mencakup segala aktivitas yang terkait dengan manajemen, pengarsipan, pengelolaan data, dan pemenuhan berbagai persyaratan regulasi⁶ Dalam konteks ini, beban administrasi dapat memiliki dampak signifikan terhadap efisiensi dan produktivitas suatu entitas. Pertama-tama, beban administrasi dapat mempengaruhi waktu dan sumber daya manusia yang dialokasikan untuk menyelesaikan tugas-tugas administratif. Jika beban administrasi terlalu besar, hal ini dapat menyebabkan penurunan produktivitas karena staf harus menghabiskan lebih banyak waktu untuk menyelesaikan pekerjaan administratif daripada fokus pada tugas inti yang lebih strategis.

Selain itu, beban administrasi juga berdampak pada biaya operasional suatu organisasi. Jumlah sumber daya yang diperlukan untuk menjalankan fungsi administratif, seperti gaji staf administrasi, pengeluaran teknologi informasi, dan biaya pelatihan, dapat menjadi faktor utama dalam menentukan biaya keseluruhan organisasi.

Beban administrasi juga dapat menciptakan tantangan dalam hal kepatuhan terhadap regulasi. Seiring dengan bertambahnya peraturan dan kebijakan pemerintah, organisasi harus meluangkan waktu dan sumber daya untuk memastikan bahwa mereka mematuhi semua persyaratan hukum. Beban administrasi yang tinggi dapat menyebabkan risiko ketidakpatuhan dan denda yang berpotensi merugikan organisasi.

Dalam konteks teknologi informasi, implementasi dan pemeliharaan sistem administrasi juga dapat menjadi beban tersendiri. Penggunaan perangkat lunak dan sistem informasi yang tidak efisien dapat menambah kompleksitas beban administrasi, sementara penggunaan teknologi yang canggih dapat membantu mengurangi beban tersebut.

⁶ Nielsen, M. M., Carvalho, N. R., Veiga, L. G., & Barbosa, L. S. (2017, March). Administrative burden reduction over time: Literature review, trends and gap analysis. In *Proceedings of the 10th International Conference on Theory and Practice of Electronic Governance* (pp. 140-148).

Untuk mengatasi beban administrasi, organisasi dapat mengadopsi strategi efisiensi, seperti otomatisasi proses administratif, penggunaan teknologi informasi yang canggih, dan perbaikan terus-menerus pada kebijakan dan prosedur internal. Selain itu, pengembangan keterampilan staf administrasi melalui pelatihan dan pengembangan juga dapat membantu meningkatkan produktivitas.

Analisis beban administrasi dapat memberikan wawasan yang berharga bagi organisasi dalam meningkatkan efisiensi, mengoptimalkan sumber daya, dan mencapai tujuan strategis mereka.

Dalam konteks Dinas Perindustrian dan Perdagangan, analisis beban administrasi menjadi sangat relevan karena dinas ini memiliki tanggung jawab untuk mengelola dan mengawasi berbagai aspek terkait perindustrian dan perdagangan di suatu wilayah atau negara. Berikut adalah kaitan analisis beban administrasi dengan Dinas Perindustrian dan Perdagangan:

1. Pengelolaan Perizinan Usaha:

Dinas Perindustrian dan Perdagangan seringkali bertanggung jawab untuk memberikan izin usaha kepada perusahaan-perusahaan di wilayahnya. Proses perizinan yang rumit dan memakan waktu dapat menjadi beban administrasi yang signifikan. Analisis beban administrasi dapat membantu dinas ini untuk mengidentifikasi proses-proses yang dapat diotomatisasi atau disederhanakan untuk mempercepat pemberian izin usaha⁷

2. Pemantauan Kepatuhan dan Regulasi

Dalam menjalankan tugasnya, Dinas Perindustrian dan Perdagangan harus memastikan bahwa perusahaan-perusahaan di wilayahnya mematuhi regulasi yang berlaku. Beban administrasi dapat muncul dari kebutuhan untuk memonitor kepatuhan dan mengelola dokumentasi terkait. Analisis beban administrasi dapat membantu dinas ini untuk mengevaluasi efisiensi proses pemantauan dan menentukan apakah ada cara untuk mengurangi beban tersebut.

3. Pengelolaan Data Perdagangan dan Industri

Dinas ini sering kali harus mengumpulkan, menyimpan, dan mengelola data terkait industri dan perdagangan di wilayahnya. Beban administrasi dapat timbul dari tugas-tugas pengelolaan data ini. Analisis dapat membantu mengevaluasi sistem informasi yang digunakan dan menyarankan perbaikan atau modernisasi untuk meningkatkan efisiensi pengelolaan data

4. Pemberdayaan Industri Kecil dan Menengah (IKM)

Dinas Perindustrian dan Perdagangan biasanya terlibat dalam upaya pemberdayaan IKM. Beban administrasi dalam hal ini mungkin muncul dari proses pelatihan, pendampingan, atau administrasi program-program dukungan. Analisis beban administrasi dapat membantu dinas untuk menyusun strategi

⁷ Anwar, M. J. F. (2018). ANALISIS SISTEM PEMANTAUAN PASAR KEBUTUHAN POKOK (SP2KP) DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN DIY.

yang lebih efisien dalam memberdayakan IKM tanpa memberatkan mereka dengan prosedur administratif yang berlebihan⁸.

5. Pengembangan Keterampilan dan Pelatihan

Peningkatan keterampilan staf di dalam dinas sendiri juga merupakan aspek penting. Analisis beban administrasi dapat membantu dalam menilai efisiensi program pelatihan internal, mengidentifikasi kebutuhan pelatihan, dan menentukan apakah ada cara untuk mengurangi beban administratif dalam pengelolaan program tersebut.

Dengan melakukan analisis beban administrasi yang cermat, Dinas Perindustrian dan Perdagangan dapat mengidentifikasi peluang untuk meningkatkan efisiensi operasional, mengurangi biaya administrasi, dan memberikan dukungan yang lebih baik kepada perusahaan dan pelaku industri di wilayahnya. Referensi-referensi yang telah disebutkan sebelumnya dapat memberikan wawasan tambahan dalam merancang strategi untuk mengatasi beban administrasi di dalam konteks dinas ini.

Analisis Prosedur

Proses analisis internal Badan Dinas menjadi langkah krusial dalam upaya peningkatan efisiensi dan responsivitas terhadap dinamika industri dan perdagangan. Dengan memeriksa secara rinci prosedur internal, Badan Dinas berusaha mengidentifikasi area yang memerlukan perbaikan guna mencapai efisiensi maksimal. Proses-proses yang diidentifikasi sebagai lambat atau tidak efisien menjadi fokus utama analisis. Rekomendasi rancangan ulang diajukan sebagai solusi untuk memastikan bahwa setiap langkah dalam prosedur dapat dijalankan dengan optimal. Selain itu, penggunaan teknologi diperkenalkan sebagai langkah strategis untuk mempercepat berbagai proses. Untuk memastikan keberhasilan implementasi teknologi ini, pegawai Badan Dinas diberikan pelatihan agar dapat memahami dan mengadopsi perubahan dalam prosedur operasional dengan lebih efektif.

Peningkatan prosedur operasional tidak hanya melibatkan perubahan dalam aspek teknis, tetapi juga mencakup transformasi budaya organisasi. Pemahaman mendalam terhadap pentingnya perubahan budaya tercermin dalam upaya Badan Dinas untuk memberikan pelatihan kepada karyawan. Pelatihan ini dirancang untuk mengubah paradigma dan sikap karyawan terhadap perubahan, sehingga mereka dapat lebih mudah menerima dan mengadaptasi diri terhadap prosedur baru. Komunikasi yang efektif menjadi unsur kunci dalam mengelola perubahan budaya. Melalui komunikasi yang baik, Badan Dinas memastikan bahwa semua pemangku kepentingan, termasuk karyawan, memiliki pemahaman yang baik tentang alasan di balik perubahan dan manfaat yang dapat dihasilkan. Langkah-langkah ini membantu mengurangi resistensi terhadap perubahan, membangun dukungan, dan memastikan bahwa implementasi prosedur baru berjalan dengan lancar.

⁸ Nurhayati, S. (2012). Peran Dinas Perindustrian dan Perdagangan dalam Pengembangan Industri Kecil Menengah di Kota Surakarta.

Pentingnya pemahaman mendalam terhadap proses internal Badan Dinas juga tercermin dalam upaya identifikasi hambatan atau bottleneck. Dengan mengidentifikasi masalah ini, organisasi dapat mengambil langkah-langkah konkret untuk mengatasi kendala yang mungkin menghambat efisiensi. Langkah ini sangat penting untuk mencapai kinerja yang lebih optimal dan responsif terhadap dinamika industri dan perdagangan yang terus berubah.

Secara keseluruhan, melalui pemeriksaan dan perbaikan prosedur internal, pengenalan teknologi, perubahan budaya organisasi, pelatihan karyawan, dan identifikasi serta penanganan hambatan, Badan Dinas bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang lebih efisien, adaptif, dan responsif terhadap tuntutan dinamika industri dan perdagangan. Inisiatif ini mencerminkan komitmen Badan Dinas dalam meningkatkan pelayanan dan kinerja organisasi secara menyeluruh.

Strategi Perampingan

Pada tingkat strategis, penelitian menyoroti beberapa strategi perampingan yang dapat diterapkan oleh Badan Dinas. Pengembangan karyawan menjadi fokus utama, di mana evaluasi kebutuhan pelatihan dilakukan. Program pelatihan yang tepat diimplementasikan untuk meningkatkan keterampilan pegawai, memberikan mereka alat yang diperlukan untuk melaksanakan tugas-tugas mereka secara lebih efisien. Karyawan yang terlatih dengan baik juga dapat menjadi agen perubahan internal, mempercepat adopsi perubahan dan memotivasi rekan kerja mereka.

Pertimbangan outsourcing juga menjadi bagian integral penting dari strategi perampingan. Identifikasi tugas yang dapat dioutsourcing dilakukan dengan cermat, dengan seleksi penyedia layanan yang memenuhi standar kualitas yang diinginkan. Manajemen kontrak yang efektif dan pemantauan kinerja outsourcing menjadi kunci kesuksesan strategi ini. Outsourcing, sementara itu, memerlukan manajemen kontrak yang cermat. Perjanjian kontrak yang jelas dan transparan antara Badan Dinas dan penyedia layanan perlu dibangun untuk memastikan keberlanjutan kualitas layanan. Selain itu, pemantauan kinerja secara teratur diperlukan untuk memastikan bahwa keuntungan yang diinginkan dari outsourcing tercapai.

Kolaborasi interdepartemental juga dianggap sebagai langkah strategis untuk merampingkan pengelolaan Badan Dinas. Fasilitasi komunikasi dan koordinasi antar departemen diharapkan dapat mengurangi tumpang tindih tugas dan meningkatkan efisiensi operasional secara keseluruhan. Oleh karena itu, program pengembangan tim dan kegiatan kolaboratif diarahkan untuk meningkatkan keterlibatan dan pemahaman antar departemen. Sinergi yang dibangun melalui kolaborasi ini diharapkan dapat meningkatkan efisiensi dan meningkatkan koordinasi tugas di antara departemen terkait.

Dalam mengambil langkah-langkah ini, Badan Dinas Perindustrian dan Perdagangan dapat mengharapkan dampak positif yang signifikan. Efisiensi operasional yang ditingkatkan akan menciptakan lingkungan yang lebih responsif dan adaptif terhadap perubahan pasar dan kebutuhan masyarakat. Selain itu, implementasi strategi perampingan dapat membuka peluang baru, seperti pengembangan inovasi dan proyek strategis yang lebih besar.

Namun, perlu diingat bahwa implementasi strategi perampingan bukanlah tujuan akhir, melainkan proses yang berkelanjutan. Badan Dinas harus memiliki mekanisme evaluasi yang terus-menerus untuk memonitor dampak perubahan dan

melakukan penyesuaian sesuai kebutuhan. Selain itu, partisipasi dan dukungan penuh dari kepemimpinan organisasi serta keterlibatan seluruh pegawai menjadi kunci keberhasilan implementasi strategi perampingan ini.

Berikut di bawah ini adalah hasil wawancara yang telah dilakukan penulis pada tanggal 8 November 2023 dengan Dinas Perindustrian dan Perdagangan (DISPERINDAG) Provinsi Jawa Tengah. Penulis melakukan wawancara dengan Dinas Perindustrian dan Perdagangan (DISPERINDAG) untuk mendapatkan wawasan yang lebih mendalam mengenai peran dan tugas mereka dalam mengelola aspek perindustrian dan perdagangan di wilayah tersebut. Berikut adalah beberapa kutipan dan kata-kata yang mencerminkan hasil dari wawancara tersebut:

Nama Informan: Ilham Riza Al-Majid

Kedudukan : Staf bagian pengawasan DISPERINDAG Provinsi Jawa Tengah

Pertanyaan Pembuka	Jawaban
Bagaimana proses pemberian izin usaha diatur dan dijalankan, dan apakah ada hambatan administratif yang dapat diidentifikasi?	“ untuk saat ini untuk pemberian izin usaha diatur oleh OSS sepenuhnya, jadi langsung pemerintah pusat karean sesuai visi misi presiden kita, untuk provinsi sendiri itu hanya sebagai rekomendasi mengenai kesesuaian beberapa usaha yang diatur, seperti minuman beralkohol dan bahan berbahaya dan karena kita ini dinas yg hanya mencakup provinsi jadi hambatannya ada di rekomendasi kepada beberapa usaha tentang kesesuaiannya”

Pertanyaan Kunci	Jawaban
Bagaimana proses pengawasan dan pelaporan regulasi bisnis kepada Dinas Perindustrian dan Perdagangan terorganisir?	“untuk pengawasan sendiri itu, kita masih menggunakan UU perlindungan konsumen, masih terkait dengan perijinan dan perindustriannya, seperti distribusi, bahan pokok dan bahan penting (bapokting), di UU perlindungan konsumen juga diatur terkait barang-barang yang wajib memenuhi standar atau SNI dan ketentuan lain seperti label, manual kartu garansi dan kalau yang terbaru kan sudah dimasukkan ke dalam UU Cipta kerja, kalau tidak salah pasal 8 nah sekarang masuknya sudah kesitu. Ya tidak jauh beda sih sebenarnya.. Untuk mengenai pengawasan sendiri kita secara berkala atau rutin lah istilahnya kita menjadwalkan tiap bulan kemana, danlaporannya itu juga, jadi setelah kita melakukan pengawasan kita langsung buat laporan dan untk laporan tahunan itu juga ada”
Apakah ada prosedur tetap yang mungkin memerlukan penyempurnaan atau perbaikan untuk mengurangi beban administrasi?	“Tentu, prosedur tetap sering kali ya memerlukan penyempurnaan atau perbaikan guna mengurangi beban administrasi. Ada sih beberapa langkah yang diambil untuk meningkatkan efisiensi dan mengurangi beban administrative seperti melibatkan evaluasi dan perbaikan dalam beberapa aspek, seperti Pelatihan dan Pengembangan Pegawai dengan

Bagaimana interaksi antara Dinas Perindustrian dan Perdagangan dengan pemangku kepentingan bisnis dan industri diatur dan dijalankan?	memastikan bahwa pegawai memiliki keterampilan yang sesuai dengan tugas mereka dapat membantu meningkatkan efisiensi dan juga menggunakan Teknologi Informasi yang Efisien dengan memastikan bahwa sistem informasi yang digunakan sesuai dengan kebutuhan dan beroperasi dengan baik dapat mengurangi waktu yang dihabiskan untuk proses data atau informasi yang masuk ke kita.”
Apakah ada tindakan khusus yang telah diambil untuk mengurangi birokrasi atau memotong biaya administratif yang tidak perlu?	“Untuk disini sendiri langsung ke pelaku usaha perdagangan itu sendiri, kita berinteraksi langsung lah saat pengawasan... datang langsung Tanya-tanya perijinannya bagaimana terus barang tersebut sudah memenuhi standar belum? Kalau belum kita beri penjelasan, lalu kadang mereka yang cerita sendiri terkit kendala mereka, kadang kan gak semua pelaku usaha tuh aware sama kebijakan terbaru kan atau kurang update lah istilahnya.” “Kalau disini kebetulan tidak adaseperti itu sih, free ya kalau mungkin itu di bidang pelayanannya kan ini di bidang pengawasannya, kalau pengawasan itu kita datang langsung jadi tidak ada tidak ada biaya administrasinya”
Bagaimana staf Dinas ini diberdayakan untuk menjalankan tugas administratif dengan efisien dan efektif?	“untuk administrasi sendiri, kalau saya lebih ke administrasi keuangan, saya sehabis pengawasan kan itu banyak sekali administrasi yang harus diselesaikan, jadi saya setelah melakukan pengawasan langsung menyelesaikan administrasi semuanya gitu loh, kalau biasa habis pengawasan sehari setelah itu administrasi sudah selesai semua , ya sama bikin administrasi seperti istilahnya rencana kerja tentang anggaran, mungkin lebih ke tata usaha umum itu kan banyak sekali administrasinya kalau saya hanya sebatas itu sih, pengawasan tupoksi saya.”

Pertanyaan

Apakah ada upaya untuk mengadopsi teknologi atau otomatisasi dalam pengurangan beban administrasi?

Jawaban

“Untuk itu kita lebih mengikuti teknologi atau aplikasi yang ada sih entah dari keuangan, entah itu umum kayak gitu, jadi, kita inovasi pun belum tentu diterima sama mereka kerna kita saling terkait itu loh. Untuk sekarang ada websitenya, itu dari pemprov sendiri itu ada aplikasinya di RNS itu kan, kalau untuk di dinas sendiri itu masih manual, jadi untuk inovasi disini tuh belum ada untuk mengurangi beban administrasi”

Pertanyaan Penutup	Jawaban
1. Sejauh ini, Apakah saja kesulitan dalam menjalani penugasan bapak?	“ Kesukitannya sih untuk saat ini lebih ke database, kan kita pengawasan yaa jadi harus tau, harus punya data lah apasih yang hrus kita awasi dan untuk saat ini kita masih kekurangan disitu, jadi kita turun lapanga tuh secara acak, seketumnya gitu loh, jadi mungkin tidak bisa mencakup semuanya. Dan dari sisi administrasi sendiri sih mungkin terkendala server dari pusat kadang error gitu.”

Kesimpulan dari informan tersebut bahwa beban administratif dalam Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah berupa hambatan dalam rekomendasi dan juga terkait database mengenai administrasi, tetapi Badan dinas ini telah melakukan upaya dalam menanganinya, seperti halnya membentuk aplikasi ataupun website agar masyarakat lebih mudah dalam menjangkau Badan Dinas Perindustrian dan Perdagangan sendiri.

Beban administratif dalam instansi di Indonesia mencakup semua biaya dan tugas terkait manajemen, administrasi, dan pengelolaan kegiatan organisasi atau lembaga⁹. Beban administratif ini merupakan bagian integral dari operasional setiap instansi, baik pemerintah maupun swasta. Dalam konteks pemerintah Indonesia, beban administratif dapat mencakup berbagai aspek, mulai dari sumber daya manusia hingga pengelolaan keuangan dan dokumentasi.

Salah satu komponen utama dari beban administratif adalah biaya gaji dan tunjangan pegawai. Pegawai dalam instansi pemerintah diberi gaji dan tunjangan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Peningkatan jumlah pegawai dan perubahan dalam struktur organisasi dapat berkontribusi pada pertumbuhan beban administratif. Selain itu, program pelatihan dan pengembangan pegawai juga merupakan bagian dari beban administratif, karena tujuannya adalah untuk meningkatkan kompetensi dan keterampilan pegawai. Beban administratif juga mencakup pengelolaan keuangan, termasuk audit dan akuntansi. Instansi di Indonesia harus memastikan bahwa keuangan mereka dikelola secara efisien dan transparan sesuai dengan peraturan keuangan yang berlaku. Hal ini mencakup pembayaran pajak, biaya audit, dan pemeliharaan sistem informasi keuangan yang memadai.

Pengadaan dan pemeliharaan fasilitas fisik dan teknologi informasi juga merupakan bagian dari beban administratif. Gedung kantor, peralatan kantor, dan teknologi informasi yang diperlukan untuk mendukung operasional instansi juga menambah beban administratif. Perlu adanya alokasi anggaran untuk perawatan dan pemeliharaan agar fasilitas tersebut tetap berfungsi optimal.

Dalam konteks pemerintah, proses birokrasi yang kompleks juga dapat menjadi bagian dari beban administratif. Proses perizinan, pengadaan barang dan jasa, serta berbagai regulasi administratif lainnya dapat memerlukan waktu dan

⁹ Anam, K., & Rahardja, E. (2017). Pengaruh fasilitas kerja, lingkungan kerja non fisik dan kepuasan kerja terhadap kinerja karyawan (Studi pada Pegawai Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah). *Diponegoro Journal of Management*, 6(4), 502-512.

sumber daya yang signifikan. Upaya untuk menyederhanakan proses birokrasi dan meningkatkan efisiensi administratif telah menjadi fokus reformasi pemerintahan di Indonesia. Pentingnya keamanan dan perlindungan data juga menambah beban administratif, terutama dengan adopsi teknologi informasi. Instansi harus mengelola data dengan hati-hati untuk memastikan keamanan informasi dan privasi. Keberlanjutan dan kepatuhan terhadap peraturan perlindungan data merupakan tanggung jawab yang harus diemban oleh setiap instansi.

Meskipun beban administratif dapat dianggap sebagai suatu keharusan untuk menjaga kinerja dan keberlanjutan instansi, namun juga penting untuk memastikan bahwa beban tersebut dikelola dengan efisien. Proses evaluasi dan perbaikan terus-menerus diperlukan untuk mengidentifikasi potensi peningkatan efisiensi dan penghematan biaya. Ini dapat mencakup penerapan teknologi yang lebih canggih, peningkatan dalam manajemen risiko, dan reformasi proses kerja. Dalam kesimpulan, beban administratif dalam instansi di Indonesia mencakup berbagai aspek, mulai dari biaya pegawai hingga pengelolaan keuangan, infrastruktur, dan proses birokrasi. Meskipun penting untuk menjaga keberlanjutan operasional, efisiensi dan pengelolaan yang baik perlu terus diperhatikan agar beban administratif tidak menjadi hambatan bagi pencapaian tujuan dan pelayanan yang optimal.

KESIMPULAN

Dalam kesimpulan, analisis beban administratif, prosedur, dan strategi perampingan adalah langkah penting untuk meningkatkan kinerja Badan Dinas Perindustrian dan Perdagangan. Rekomendasi yang dihasilkan dari penelitian ini mencakup implementasi perubahan dalam sistem informasi, peningkatan prosedur operasional, pengembangan karyawan, outsourcing yang bijaksana, dan kolaborasi interdepartemental. Langkah-langkah ini diharapkan dapat membawa Badan Dinas menuju efisiensi yang lebih besar dan memberikan kontribusi yang lebih positif terhadap pembangunan ekonomi daerah. Evaluasi berkelanjutan dan pemantauan terhadap implementasi rekomendasi direkomendasikan untuk memastikan keberlanjutan perbaikan dalam jangka panjang.

Dengan implementasi strategi perampingan yang cermat dan berkelanjutan, Badan Dinas Perindustrian dan Perdagangan dapat membangun fondasi yang kuat untuk merespons dinamika ekonomi dan industri secara efektif, mendukung pertumbuhan ekonomi daerah, dan memberikan manfaat maksimal kepada masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Anwar, M. J. (2018). ANALISIS SISTEM PEMANTAUAN PASAR KEBUTUHAN POKOK (SP2KP) DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN DIY. 24.
- Chandranegara, I. S. (2020). Bentuk-Bentuk Perampingan dan Harmonisasi Regulasi. *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, 23. doi:<https://doi.org/10.20885/iustum.vol26.iss3.art1>
- Dewi Kusumaningsih, S. R. (2021). Analisis motivasi, disiplin Dan beban kerja Yang mempengaruhi kinerja pegawai negeri sipil pada dinas perindustrian Dan perdagangan kabupaten kebumen. *Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis Indonesia*, 1(2), 18. doi:10.32477/jrabi.v1i2.382
- Dhurata Ivziku MSN, P. R. (2021). Nursing workload and the changing health care environment: A review of the literature. *Journal of Nursing Management*, 9. doi:10.5929/2011.1.2.11
- Djadjuli, D. (2018). PERAN PEMERINTAH DALAM PERKEMBANGAN EKONOMI DAERAH. *Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara*, 5(2), 14. doi:<http://dx.doi.org/10.25157/dinamika.v5i2.1409>
- Dona.E. (2016). Pengaruh Perencanaan, Prosedur Dan Pengawasan dan Komitmen Organisasi dalam Pelaksanaan Anggaran Terhadap Kinerja Pegawai Dinas Pekerja Umum Kota Pariaman. *Jurnal Riset Manajeme dan Akuntansi*, 23-25.
- Faisal Sarifudin, T. A. (2023). AnalisisBeban Administrasi Terhadap Pelayanan Publik pada Program Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di DPMPTSP Provinsi Jawa Tengah. *Journal of Administrative Science*, 12.
- Irzan Soepriyadi, R. R. (2022). Pengantar manajemen sumber daya manusia. Padang, Sumatera Barat: PT. GLOBAL EKSEKUTIF TEKNOLOGI.
- Khoirul Anam, E. R. (2017). PENGARUH FASILITAS KERJA, LINGKUNGAN KERJA NON FISIK DAN KEPUASAN KERJA TERHADAP KINERJA KARYAWAN (Studi pada Pegawai Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah. *DIPONEGORO JOURNAL OF MANAGEMENT*, 6(4), 11.
- Kismono, G. (1999). Perubahan Lingkungan, Transformasi Organisasional dan Reposisi Peran Fungsi Sumberdaya Manusia. *Journal of Indonesian Economy and Business*, 14, 22.
- Kusnanta, K. (2022). Analisis Pengaruh Disiplin Dan Lingkungan Kerja Terhadap Kinerja Pegawai Negeri Sipil Pada Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian Dan Perdagangan Kabupaten Semarang. *Jurnal Visi Manajemen*, 8(3), 159-166. doi:10.56910/jvm.v8i3.229
- Nuno Ramos Carvalho, L. S. (2018). Administrative Burden Reduction Over Time: Literature Review, Trends and Gap Analysis. *ACM DIFITAL LIBRARY*, 140-148.
- NURHAYATI, S. (2012). PERAN DINAS PERINDUSTRIA DAN PERDAGANGA DALAM PENGEMBANGAN INDUSTRI KECIL MENENGAH DI KOTA SURAKARTA. 55.

- Nursadi, H. (2018). *Hukum Administrasi Negara Sektorial*. Depok: Badan Penerbit FHUI.
- Sulistiyastuti, D. R. (2009). *Dinamika Usaha Kecil dan Menengah (UKM) Analisis Konsentrasi Regional UKM di Indonesia 1999 – 2001*. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 9(2), 143-164. doi:<https://doi.org/10.20885/ejem.v9i2.617>
- United States. Congress. House. Committee on Science, S. a. (2014). *Reducing The Administrative Workload For Federally Funded Research*. DC area: U.S GOVERNMENT PRINTING OFFICE WASHINGTON.
- Zebua, R. S. (2023). *BISNIS DIGITAL: STRATEGI ADMINISTRASI BISNIS SIGITAL UNTU MENGHADAPI MASA DEPAN*. Jambi: PT. Sonpedia Publihing Indonesia.